



DAMPAK BELANJA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Apri Prayoga Arrfah
Universitas Trisakti, Jakarta

Syafri
Universitas Trisakti, Jakarta

Alamat Korespondensi: syafri@trisakti.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[01 12 2022]

Dinyatakan Diterima
[14 12 2022]

KATA KUNCI:
pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi inklusif, kemiskinan, belanja pemerintah

KLASIFIKASI JEL:
H5

ABSTRAK

The background of this research is the high average GRDP (Gross Regional Domestic Product) growth in Central Sulawesi Province in the last decade, but the province also has a high poverty rate. Therefore, this research was conducted to measure and analyze the inclusiveness of economic development and its determinants from the aspect of government intervention in the form of local government spending. The research method used is panel data regression with FEM (fixed effect model) from 10 regencies/cities in Central Sulawesi from 2011 to 2020. The results of the study showed that regional government spending on housing and public facilities functions has a positive and significant effect on inclusive economic development, while local government spending on education and social protection functions has a positive but not significant effect on inclusive economic development.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya rata-rata pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) di Provinsi Sulawesi Tengah dalam satu dekade terakhir, namun provinsi tersebut memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Oleh sebab itu, penelitian dilakukan untuk mengukur dan menganalisis inklusifitas pembangunan ekonomi dan faktor penentunya dari aspek intervensi pemerintah berupa belanja pemerintah daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi data panel dengan FEM (*fixed effect model*) dari 10 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah pada kurun waktu tahun 2011 sampai 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja fungsi perumahan dan fasilitas umum serta belanja fungsi kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan ekonomi inklusif, sedangkan belanja fungsi pendidikan dan perlindungan sosial berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pembangunan ekonomi inklusif.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi nasional tak lepas dari pengaruh pertumbuhan ekonomi yang terjadi di seluruh daerah. Dengan berbagai variasi demografi, geografi, dan struktur ekonominya, setiap daerah menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang beragam. Namun, angka pertumbuhan ekonomi masih umum dijadikan salah satu indikator utama pengukur keberhasilan pembangunan suatu wilayah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini dilandasi teori bahwa pertumbuhan ekonomi merepresentasikan nilai tambah barang dan jasa yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.

Namun demikian, strategi pembangunan yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi kerap kali dihadapkan pada *trade-off* dengan pemerataan hasil pembangunan. Menurut Arsyad (2017), pertumbuhan dan pemerataan merupakan dua kutub strategi pembangunan yang sering kali saling mengabaikan (*trade-off*). Artinya, pembangunan yang menitikberatkan pada aspek target pertumbuhan ekonomi cenderung akan 'mengorbankan' aspek pemerataan, begitu pula sebaliknya.

Lebih lanjut, kebijakan yang memprioritaskan pertumbuhan ekonomi tinggi tidak lepas dari harapan bahwa pertumbuhan tersebut akan menstimulus perekonomian di bawahnya sehingga mampu menyerap tenaga kerja dan menciptakan kesetaraan distribusi ekonomi. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam teori *trickle-down effect* atau dampak tetesan ke bawah yang digagas oleh Hirschman (1954).

Namun, pertumbuhan ekonomi adalah suatu ukuran hasil agregat dari seluruh lini masyarakat, sehingga tidak diketahui siapa yang meningkatkan pertumbuhan; apakah seluruh kalangan atau hanya sekelompok masyarakat tertentu. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin bahwa seluruh masyarakat akan diuntungkan secara merata (Prakoso & Agustina, 2021).

Fenomena tersebut setidaknya dapat dilihat di Provinsi Sulawesi Tengah, yang merupakan provinsi dengan rata-rata tingkat pertumbuhan PDRB tertinggi dalam satu dekade terakhir. Pada 2011-2021, Provinsi Sulawesi Tengah mencatatkan rata-rata pertumbuhan PDRB sebesar 10,23%, jauh melampaui rata-rata pertumbuhan PDRB nasional yang hanya sebesar 4,52%.

Meski demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum diikuti dengan peningkatan indikator kesejahteraan secara umum. Hal ini dikarenakan masih tingginya tingkat kemiskinan di provinsi tersebut. Sulawesi Tengah masuk 10 besar provinsi dengan rata-rata tingkat kemiskinan tertinggi pada satu dekade terakhir dengan rata-rata kemiskinan 13,93%, melampaui rata-rata kemiskinan nasional 12,49%. Di samping itu, Sulawesi Tengah juga dihadapkan pada masalah ketenagakerjaan di mana tingkat pengangguran terbuka (TPT) Sulawesi Tengah meningkat dari 3,68% pada 2014 menjadi 3,75% pada 2021.

Tabel 1
10 Provinsi dengan Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Tertinggi

Provinsi dengan Rata-Rata Pertumbuhan PDRB Tertinggi (2011-2021)		Provinsi dengan Rata-Rata Kemiskinan Tertinggi (2011-2021)	
Provinsi	Tingkat Pertumbuhan	Provinsi	Tingkat Kemiskinan
Sulawesi Tengah	10,23%	Papua	28,61%
Maluku Utara	7,37%	Papua Barat	24,89%
Sulawesi Tenggara	6,59%	Nusa Tenggara Timur	20,98%
Sulawesi Selatan	6,53%	Maluku	18,92%
Sulawesi Barat	6,13%	Gorontalo	16,95%
Gorontalo	5,94%	Aceh	16,72%
Kalimantan Tengah	5,57%	Bengkulu	16,33%
Sulawesi Utara	5,38%	Nusa Tenggara Barat	16,02%
DKI Jakarta	5,12%	Sulawesi Tengah	13,93%
Maluku	5,08%	Lampung	13,76%
Rata-rata nasional	4,52%	Rata-rata nasional	12,49%

Sumber: BPS, diolah

Berdasarkan penjelasan empiris di atas, maka dapat diketahui bahwa Sulawesi Tengah mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun belum mampu menyelesaikan masalah kesejahteraan sosial, yang juga membuktikan bahwa teori *trickle-down effect* tidak berlaku di Sulawesi Tengah.

Fenomena ini juga menjadi gambaran bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Sulawesi Tengah belum sepenuhnya inklusif. Dengan demikian, studi ini bertujuan untuk menganalisis tingkat inklusifitas perekonomian Sulawesi Tengah pada kurun waktu 2011-2020 dengan melihat pengaruh dari alokasi belanja pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang terkait dengan pencapaian pembangunan ekonomi inklusif.

2. KERANGKA TEORI

Belanja Pemerintah

Di dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Rincian belanja negara menurut organisasi disesuaikan dengan susunan kementerian/lembaga pemerintah pusat. Sementara rincian belanja negara menurut fungsi terdiri dari sebelas fungsi, yakni fungsi (1) pelayanan umum, (2) pertahanan, (3) ketertiban dan keamanan, (4) ekonomi, (5) lingkungan hidup, (6) perumahan dan fasilitas umum, (7) kesehatan, (8) pariwisata dan budaya, (9) agama, (10) pendidikan, dan (11) perlindungan sosial. Sementara itu, rincian belanja negara menurut jenis belanja terdiri dari (1) belanja pegawai, (2) belanja barang, (3) belanja modal, (4) pembayaran bunga utang, (5) subsidi, (6) belanja hibah, (7) bantuan sosial, dan (8) belanja lain-lain.

Lebih lanjut, rincian belanja pemerintah pusat menurut fungsi yang terdiri atas 11 fungsi dan 69 sub-fungsi merupakan reklasifikasi atas program-program yang dalam format sebelumnya yang dirinci dari sektor/subsektor. Klasifikasi menurut fungsi (dan sub-fungsi) merupakan pengelompokan dari program-program kementerian negara/lembaga dan hanya merupakan alat analisis (*tools of analysis*) yang digunakan untuk menganalisa fungsi-fungsi yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah sesuai dengan praktik baik internasional. Klasifikasi menurut fungsi yang diterapkan dalam sistem penganggaran di Indonesia telah mengacu pada *classification of the functions of government (COFOG)* yang disusun oleh *United Nations Development Programme (UNDP)* dan diadopsi *Government Finance Statistics Government Finance Statistics (GFS) manual 2001 – International Monetary Fund (IMF)*, dengan sedikit modifikasi berupa pemisahan fungsi agama dari fungsi rekreasi, budaya dan agama (Ditjen Anggaran, 2014).

Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Dalam *General Theory* Keynes, dijelaskan bahwa kesalahan yang menonjol dari masyarakat ekonomi tempat kita hidup adalah kegagalan untuk menyediakan lapangan kerja penuh dan distribusi kekayaan dan pendapatannya yang sewenang-wenang dan tidak adil. Setidaknya sejak saat itu, para ekonom tertarik dengan isu ketimpangan dan hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi (Alekhina & Ganelli, 2020).

Hubungan ketimpangan dengan pertumbuhan ekonomi kemudian dijelaskan dalam konsep pembangunan ekonomi inklusif; suatu paradigma pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, namun juga

memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat.

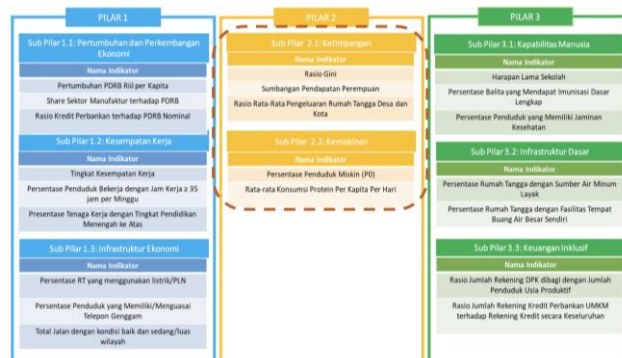
Menurut Ali & Son (2007), pertumbuhan inklusif didefinisikan sebagai pertumbuhan yang tidak hanya menciptakan peluang ekonomi baru, tetapi juga menjamin akses yang sama terhadap peluang yang diciptakan untuk semua segmen masyarakat. Sementara itu, Klasen (2010) menjelaskan bahwa pertumbuhan inklusif dapat dicirikan sebagai pertumbuhan berbasis luas (*broad-base growth*) yang mencakup partisipasi nondiskriminatif. Adapun Bappenas menjelaskan pertumbuhan ekonomi inklusif sebagai pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah.

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI)

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengukur tingkat inklusifitas pembangunan di Indonesia, baik pada level nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.

IPEI dibentuk dari 3 pilar yang terdiri dari 8 sub pilar dan 21 indikator. Pilar pertama adalah pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang meliputi sub pilar pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan infrastruktur ekonomi. Adapun pilar kedua adalah pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan yang terdiri atas sub pilar ketimpangan dan kemiskinan. Sementara pilar ketiga merupakan perluasan akses dan kesempatan yang meliputi sub pilar kapabilitas manusia, infrastruktur dasar, dan keuangan inklusif. Secara lebih lengkap, indikator pembentuk IPEI dapat dilihat pada Gambar 1. Adapun pengukuran IPEI menghasilkan skala nilai pada rentang 1-10, di mana nilai 1-3 merupakan kategori “tidak memuaskan”, nilai 4-7 merupakan kategori “memuaskan”, dan nilai 8-10 merupakan kategori “sangat memuaskan”.

Gambar 1
Pilar, Sub Pilar, dan Indikator Pembentuk IPEI



Sumber: Bappenas

3. METODE PENELITIAN

3.1. Data dan Variabel

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data diperoleh dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk data pembangunan ekonomi inklusif serta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) Kementerian Keuangan untuk realisasi belanja daerah Sulawesi Tengah.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) dari 10 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah pada kurun waktu 2011-2020. Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah realisasi belanja daerah menurut fungsi perumahan dan fasilitas umum (PERUM), kesehatan (KESH), pendidikan (PEND), dan perlindungan sosial (PERSOS) dari 10 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah pada kurun waktu 2011-2020. Pemilihan 10 kabupaten/kota didasarkan pada batasan penelitian yang tidak menyertakan kabupaten/kota yang baru terbentuk setelah tahun 2011. Adapun 10 kabupaten/kota tersebut adalah Kota Palu, Kabupaten Banggai, Kabupaten Poso, Kabupaten Morowali, Kabupaten Toli Toli, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Buol, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Tojo Una Una, dan Kabupaten Donggala.

3.2. Model Penelitian

Persamaan matematis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$IPEI_{it} = \alpha + \beta_1 PERUM_{it} + \beta_2 KESH_{it} + \beta_3 PEND_{it} + \beta_4 PERSOS_{it} + u_i + \varepsilon_{it}$$

di mana:

IPEI = Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

PERUM = Realisasi belanja menurut fungsi perumahan dan fasilitas umum

KESH = Realisasi belanja menurut fungsi kesehatan

PEND = Realisasi belanja menurut fungsi pendidikan

PERSOS = Realisasi belanja menurut fungsi perlindungan sosial

α = konstanta

β = koefisien

ε = error term

i, t = kabupaten/kota, tahun

3.3. Metode Pengolahan Data

Dalam regresi data panel, terdapat tiga cara estimasi, yakni *Common Effect Model (CEM)*, *Fixed*

Effect Model (FEM), dan *Random Effect Model (REM)*. Untuk mendapatkan model estimasi terbaik, dilakukan tiga tahap pengujian yakni Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier.

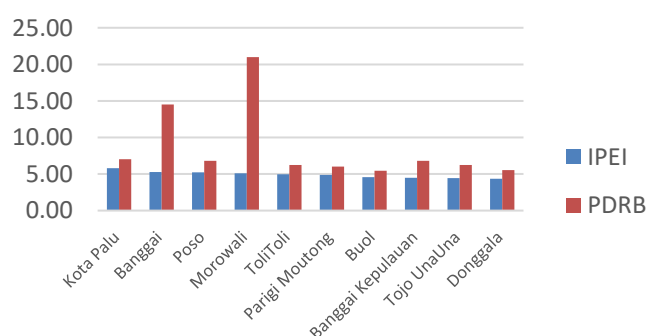
Uji Chow dilakukan untuk memilih model terbaik antara *Common Effect Model (CEM)* dan *Fixed Effect Model (FEM)*. Adapun Uji Hausman dilakukan untuk memilih model terbaik antara *Random Effect Model (REM)* dan *Fixed Effect Model (FEM)*. Sementara Uji Lagrange Multiplier dilakukan untuk memilih model terbaik antara *Common Effect Model (CEM)* dan *Random Effect Model (REM)*.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Deskriptif

Selama rentang waktu 2011-2019, pertumbuhan PDRB Sulawesi Tengah didominasi oleh pertumbuhan yang terjadi di Kabupaten Morowali, di mana rata-rata pertumbuhan PDRB kabupaten tersebut sebesar 21% setiap tahunnya. Meski demikian, pencapaian pembangunan inklusif terbaik terjadi di Kota Palu dengan rata-rata pertumbuhan IPEI tertinggi dengan 5,81%. Adapun Donggala menjadi kabupaten dengan rata-rata pertumbuhan PDRB (4,35%) dan IPEI (5,55%) terendah di Sulawesi Tengah. Perbedaan tinggi rendahnya IPEI kabupaten dan kota disebabkan karena capaian pada indikator pembentuk IPEI di daerah perkotaan nilainya lebih tinggi dari kabupaten (Safitri, Ananda, & Prasetya, 2021).

Grafik 1
Rata-rata Pertumbuhan IPEI & Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota Sulawesi Tengah 2010-2019



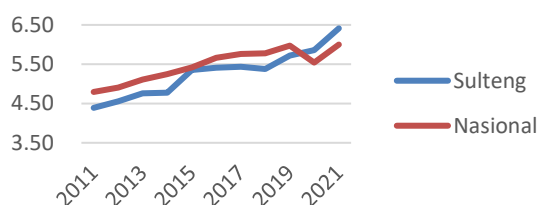
Sumber: Bappenas & BPS, diolah

Sementara itu, Grafik 2 menunjukkan bahwa sejak 2011 sampai 2019, tingkat inklusifitas ekonomi Sulawesi Tengah berada di bawah rata-rata nasional. Namun kemudian melampaui indeks inklusif nasional pada 2020 dan 2021 ketika indeks nasional menurun. Hal ini menjadi gambaran bahwa pembangunan inklusif di Sulawesi Tengah berada di jalur yang positif dan tidak

terpengaruh oleh dampak pandemi Covid-19 yang terjadi pada 2020-2021.

Sejalan dengan itu, tren jangka panjang menunjukkan bahwa pertumbuhan inklusif di Sulawesi Tengah mengalami peningkatan di mana indeks inklusif pada 2011 tercatat sebesar 4,39, kemudian secara bertahap meningkat menjadi 6,41 di tahun 2021. Angka tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi inklusif di Sulawesi Tengah masuk dalam kategori memuaskan, sebagaimana indikator yang ditentukan oleh Bappenas.

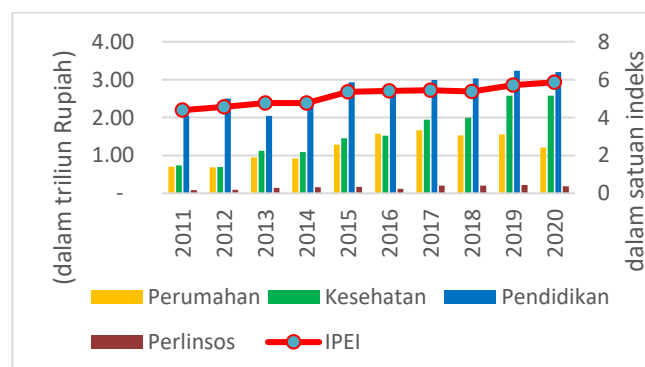
Grafik 2
Perkembangan IPEI Sulawesi Tengah dan Rata-rata Nasional 2011-2021



Sumber: Bappenas, diolah

Selanjutnya, dari empat jenis belanja menurut fungsi yang terkait dengan pembentuk nilai IPEI, dalam grafik 3 terlihat bahwa selama satu dasawarsa terakhir, realisasi pengeluaran terbesar pemerintah provinsi Sulawesi Tengah adalah pada belanja fungsi pendidikan. Disusul belanja fungsi kesehatan, perumahan, dan perlindungan sosial. Secara tren, hanya belanja fungsi kesehatan yang mencatatkan konsistensi pertumbuhan yang positif sejak 2012. Sementara tiga jenis belanja lain mengalami realisasi yang fluktuatif.

Grafik 3
Realisasi Belanja Menurut Fungsi dan Pencapaian IPEI Sulawesi Tengah 2011-2020



Sumber: Kemenkeu & Bappenas, diolah

4.2. Pengujian Pemilihan Model

Untuk menentukan pengaruh dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini, penulis menggunakan regresi data panel dengan pengolahan menggunakan alat *Eviews 12*. Adapun dalam memilih model estimasi terbaik, dilakukan tiga tahap pengujian, yakni Uji *Chow*, Uji *Hausman*, serta Uji *Lagrange Multiplier*.

Dari tabel 2, diperoleh nilai *Prob. Cross Section F* sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%, sehingga hipotesis nol (H_0) ditolak. Oleh sebab itu, berdasarkan hasil uji *Chow* ini, model yang terbaik adalah model *Fixed Effect (FEM)*.

Tabel 2
Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section Chi-square	176.007688	9	0.0000

Sumber: hasil olah data

Tahap selanjutnya, untuk menentukan model yang terbaik antara *Fixed Effect* atau *Random Effect*, penulis melakukan Uji *Hausman* dengan hasil sebagaimana tertera pada tabel 3. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai *Prob. Cross Section F* sebesar 0,0000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%, sehingga hipotesis nol (H_0) diterima. Dengan demikian, berdasarkan hasil Uji *Hausman* disimpulkan bahwa model yang terbaik adalah model *Fixed Effect (FEM)*. Lebih lanjut, model *FEM* terbaik diperoleh dengan *Feasible Generalized Least Square (FGLS)*. Adapun Uji *Lagrange Multiplier* tidak dilakukan karena hipotesis nol dalam Uji *Hausman* diterima.

Tabel 3
Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	67.925688	4	0.0000

Sumber: hasil olah data

4.3. Pengujian Asumsi Klasik

Menurut Greene (2012) dalam Prakoso & Agustina (2022), model *fixed effect* yang

menggunakan metode *Feasible Generalized Least Square* (FGLS) dengan bobot *cross sectional* telah mengakomodasi heteroskedastisitas dan autokorelasi, sehingga asumsi yang harus dipenuhi hanya normalitas dan non-multikolinearitas. Oleh sebab itu, penulis melakukan kedua uji asumsi klasik tersebut.

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinearitas

	PERUM	KESH	PEND	PERSOS
PERUM	1.000000	0.543340	0.566485	0.577580
KESH	0.543340	1.000000	0.748139	0.687485
PEND	0.566485	0.748139	1.000000	0.627296
PERSOS	0.577580	0.687485	0.627296	1.000000

Sumber: hasil olah data

Uji normalitas data dengan menggunakan pendekatan *Residual Test* dan *Histogram Normality Test* menunjukkan hasil probabilitas *jarque bera* sebesar 0,493107 di mana lebih besar dari tingkat alpha 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Selanjutnya, Berdasarkan uji multikolinearitas, diperoleh hasil bahwa seluruh nilai korelasi antar variabel independen dalam penelitian ini lebih kecil dari 0,8. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian tidak terdapat gejala multikolinearitas. Dengan demikian, model yang terpilih telah memenuhi seluruh asumsi klasik.

4.3. Hasil Estimasi

Setelah seluruh asumsi terpenuhi, hasil estimasi regresi *Fixed Effect Model* dengan *Feasible Generalized Least Square* (FGLS) ditunjukkan pada tabel 5. Berdasarkan tabel tersebut, Uji F simultan menghasilkan kesimpulan bahwa variabel independen secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dengan demikian, keempat jenis belanja secara simultan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif.

Berdasarkan uji t parsial dapat diketahui bahwa variabel belanja fungsi kesehatan dan pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pertumbuhan ekonomi inklusif. Sementara belanja fungsi perumahan, dan perlindungan sosial berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap indeks pertumbuhan ekonomi inklusif.

Tabel 5
Hasil Estimasi *Fixed Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Coefficient	4.431498	0.059163	74.90378	0.0000
PERUM	0.000729	0.000313	2.330138	0.0221
KESH	0.001864	0.000273	6.821265	0.0000
PEND	0.000199	0.000293	0.678450	0.4993
PERSOS	0.002522	0.002529	0.996971	0.3216

Statistical Summaries

R-squared 0.953872

Adjusted R-squared 0.946899

F-Statistic 136.7979

Prob (F-statistic) 0.000000

*Significance at $\alpha = 5\%$

Sumber: hasil olah data

Berdasarkan tabel 5 di atas, *adjusted R-squared* pada model menghasilkan nilai 0.946900 yang berarti bahwa variabel-variabel independen dalam model mampu menjelaskan pengaruh terhadap variabel dependen sebesar 94,69%. Sementara sisanya 5,31% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian.

Adapun hasil estimasi dapat dituliskan dalam bentuk persamaan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{IPEI} = & 4.43149783868 + \\ & 0.000728931459572 * \text{PERUM} + \\ & 0.00186410929176 * \text{KESH} + \\ & 0.000198604324846 * \text{PEND} + \\ & 0.0025215061833 * \text{PERSOS} + e \end{aligned}$$

Tabel 5 menunjukkan tinjauan parsial dari pengaruh masing-masing variabel terhadap pertumbuhan inklusif. Untuk variabel belanja menurut fungsi perumahan dan fasilitas umum (PERUM) hasilnya menunjukkan bahwa PERUM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan inklusif dengan koefisien regresi 0,000729, yang berarti bahwa jika PERUM meningkat satu satuan, maka indeks inklusif akan meningkat sebesar 0,000729, dengan asumsi *ceteris paribus*.

Pengaruh ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yasni & Muhammad (2020), di mana pengeluaran pemerintah pada fungsi perumahan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Demikian juga studi

Azwardi (2014) yang menyimpulkan bahwa belanja perumahan dan fasilitas umum berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di 33 provinsi di Indonesia.

Belanja fungsi perumahan dan fasilitas umum erat kaitannya dengan pilar 3 IPEI (perluasan akses dan kesempatan) pada sub pilar 3.2, yaitu infrastruktur dasar. Sebagaimana dijelaskan oleh Ditjen Anggaran (2014), bahwa penyelenggaraan penyediaan perumahan dan fasilitas umum meliputi berbagai kegiatan yang dilakukan pemerintah mencakup (1) Pembangunan Perumahan, (2) Pemberdayaan Komunitas Permukiman, (3) Penyediaan Air Minum, (4) Penerangan Jalan, (5) Litbang Perumahan dan (6) Fasilitas Umum Perumahan dan Fasilitas Umum Lainnya.

Selanjutnya, variabel belanja pemerintah menurut fungsi kesehatan (KESH) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan inklusif. Koefisien regresi bernilai 0.001864 memiliki arti bahwa jika belanja kesehatan meningkat satu satuan, maka indeks inklusif akan meningkat sebesar 0,001864, dengan asumsi *ceteris paribus*. Hal ini sejalan dengan kajian yang dilakukan Mushkin (1962), bahwa program kesehatan merupakan investasi yang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi.

Beberapa penelitian lain juga menunjukkan kesimpulan serupa, diantaranya Raghupathi & Raghupathi (2020), yang menjelaskan bahwa terdapat korelasi positif dan signifikan antara pengeluaran pemerintah Amerika Serikat di sektor kesehatan dengan GDP. Selanjutnya studi oleh Safitri, Ananda, & Prasetya (2021), menyimpulkan bahwa belanja pemerintah fungsi kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan inklusif baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Adapun cakupan alokasi belanja menurut fungsi kesehatan meliputi belanja (1) Obat dan Perbekalan Kesehatan, (2) Pelayanan Kesehatan Perorangan, (3) Pelayanan Kesehatan Masyarakat, (4) Kependudukan dan Keluarga Berencana, (5) Litbang Kesehatan, dan (6) Kesehatan Lainnya (Ditjen Anggaran, 2014).

Pada variabel belanja pemerintah menurut fungsi pendidikan (PEND), koefisien regresi sebesar 0,000199 dan *Prob* 0,4993 menunjukkan pengaruh positif yang tidak signifikan dari variabel pendidikan terhadap indeks inklusif. Hasil penelitian serupa juga ditunjukkan oleh Prakoso (2022) dan Kolawole (2016) yang menyimpulkan bahwa belanja fungsi pendidikan berpengaruh positif tidak signifikan dalam memengaruhi pertumbuhan inklusif. Pengaruh tersebut dapat diindikasikan bahwa belanja pendidikan belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya bagi masyarakat miskin untuk memperoleh akses pendidikan berkualitas.

Belanja fungsi pendidikan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, yang terdiri dari beberapa subfungsi, yaitu subfungsi pendidikan anak usia dini (PAUD), subfungsi pendidikan dasar, subfungsi pendidikan menengah, subfungsi pendidikan nonformal dan formal, subfungsi pendidikan tinggi, subfungsi pelayanan bantuan terhadap pendidikan, subfungsi pendidikan keagamaan, subfungsi penelitian dan pengembangan pendidikan, dan subfungsi pendidikan lainnya (Ditjen Anggaran, 2014).

Selanjutnya, untuk variabel belanja pemerintah menurut fungsi perlindungan sosial (PERSOS), hasil regresi menunjukkan bahwa koefisien variabel regresi dari belanja perlindungan sosial adalah 0,002522, dan uji *t* menemukan bahwa variabel tersebut berkorelasi positif meskipun tidak signifikan terhadap pertumbuhan inklusif. Hasil ini dapat menjadi indikasi salah satu penyebab masih tingginya tingkat kemiskinan di Sulawesi Tengah, yaitu tantangan akurasi penyaluran belanja perlindungan sosial, baik bersifat *inclusion error* maupun *exclusion error*. Meski demikian, hipotesis ini masih perlu penelitian lebih lanjut.

Adapun belanja perlindungan sosial mencakup: (1) Perlindungan dan Pelayanan Sosial Orang Sakit dan Cacat, (2) Perlindungan dan Pelayanan Sosial Lansia, (3) Perlindungan dan Pelayanan Sosial Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, (4) Pejuang Perlindungan dan Pelayanan Sosial Anak-anak dan Keluarga, (5) Pemberdayaan Perempuan, (6) Penyuluhan dan Bimbingan Sosial, (7) Bantuan Perumahan, (8) Bantuan dan Jaminan Sosial, (9) Litbang Perlindungan Sosial, dan (10) Perlindungan Sosial Lainnya (Ditjen Anggaran, 2014).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi inklusif di Sulawesi Tengah mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Meskipun nilai IPEI pada tahun 2011 sampai 2019 lebih rendah dibanding rata-rata nasional, namun tetap mencatatkan tren positif dan mulai melampaui indeks nasional yang menurun di tahun 2020.

Sementara itu, dari variabel yang diteliti, ditemukan bahwa empat belanja pemerintah daerah berdasarkan fungsi yang relevan (perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial) berpengaruh positif terhadap pencapaian pembangunan ekonomi inklusif yang di-proxy oleh IPEI. Namun dari tingkat signifikansi, hanya belanja menurut fungsi perumahan dan fasilitas umum serta kesehatan yang menunjukkan pengaruh yang signifikan.

Adapun rekomendasi kebijakan terkait hasil penemuan ini adalah agar kebijakan pemerintah

provinsi Sulawesi Tengah tidak hanya mengutamakan kuantitas atau nominal belanja pemerintah, tetapi juga memperhatikan aspek kualitas berupa akurasi penyalurannya. Dengan demikian, intervensi pemerintah dalam bentuk belanja daerah dapat mendorong pencapaian pembangunan inklusif yang lebih baik, yang diantaranya ditandai dari penurunan tingkat kemiskinan. Di samping itu, paradigma pembangunan ekonomi daerah ke depan seyogyanya tidak hanya memfokuskan pada aspek pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan pembangunan yang inklusif dengan memanfaatkan IPEI sebagai dasar untuk menetapkan target pembangunan daerah.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian ini terbatas pada penggunaan variabel independen berupa belanja daerah berdasarkan fungsi terkait. Oleh sebab itu, untuk penelitian selanjutnya perlu diteliti pula pengaruh variabel ekonomi makro seperti tingkat inflasi, nilai tukar Rupiah, maupun harga komoditas. Hal tersebut didasarkan pada data tingginya pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah dalam beberapa tahun terakhir yang ditopang oleh pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian (Ditjen Perbendaharaan, 2021), di mana perkembangan sektor dapat dipengaruhi kondisi ekonomi makro.

Di samping itu, penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan penggunaan metode lain untuk melihat pengaruh variabel-variabel yang diteliti terhadap pembangunan inklusif dalam jangka pendek maupun jangka panjang, serta dengan membandingkan beberapa objek penelitian berupa daerah-daerah lain yang memiliki catatan baik dalam pembangunan ekonomi inklusif.

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

- Alekhina, V., & Ganelli, G. (2021). Determinants of inclusive growth in ASEAN. *Journal of the Asia Pacific Economy*, 1-33.
- Ali, I., & Son, H. H. (2007). Measuring Inclusive Growth. *Asian Development Review*, Vol. 24 (1), pp. 11-31.
- Arsyad, L. (2017). Ekonomi Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi. Tersedia secara online di: <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/ESPA4324-M1.pdf>
- Azwardi, A. (2014). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Provinsi di Indonesia untuk Fungsi Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan serta Perumahan dan Fasilitas Umum terhadap Penduduk Miskin Tahun 2011-2013. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 1-11.
- Direktorat Jenderal Anggaran. 2014. Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia Edisi II. Jakarta: Kementerian Keuangan
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 2021. Kajian Fiskal Regional Provinsi Sulawesi Tengah. Palu: Kanwil DJPB Sulawesi Tengah.
- Klasen, S. (2010). Measuring and monitoring inclusive growth: Multiple definitions, open questions, and some constructive proposals. *ADB Sustainable Development Working Paper Series*.
- Olayinka Kolawole, B. (2016). Government spending and inclusive-growth relationship in Nigeria: An empirical investigation. *Zagreb International Review of Economics & Business*, 19(2), 33-56.
- Mushkin, S.J. (1962). Health as an Investment. *Journal of Political Economy*, 70, 129 - 157.
- Prakoso, A. D., & Agustina, N. (2022). Inclusive Growth Analysis in Central Sulawesi, The Eastern Province of Indonesia 2015-2019. *Asian Journal of Business Environment*, 12(2), 1-12.
- Raghupathi, V., & Raghupathi, W. (2020). Healthcare expenditure and economic performance: Insights from the United States Data. *Frontiers in public health*, 8, 156.
- Safitri, M. I. D., Ananda, C. F., & Prasetyia, F. (2021). Analisis dampak belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif Jawa Timur. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 6(2), 85-96.
- Yasni, R., & Muhammad, F. I. (2020). Peranan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, Transportasi, Dan Perumahan Bagi Perekonomian Indonesia. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 4(1), 72-95.